

Innovation and Technology for Reformation in Public Sector Finance

Bunga Rampai

Bunga Rampai

**Innovation and Technology
for Reformation in Public Sector Finance**

UPP STIM YKPN
IKUT MENCERDASKAN BANGSA

UPP STIM YKPN
IKUT MENCERDASKAN BANGSA

PENYUNTING:
Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Ak., CA



Buku Bunga Rampai "*Innovation and Technology for Reformation in Public Sector Finance*" ini tersusun secara sistematis untuk memudahkan pemahaman dan menambah referensi bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang keuangan sektor publik.

Rangkaian konsep dan isi yang disajikan dalam Buku Bunga Rampai ini bertujuan sebagai jendela pengetahuan bagi pembaca dalam memahami konsep-konsep secara sistematis tentang keuangan sektor publik. Isi dari Buku Bunga Rampai ini disusun berdasarkan kajian-kajian teoritis dan hasil penelitian yang menyangkut tentang keuangan sektor publik.

Diharapkan Buku Bunga Rampai yang merupakan kontribusi dari mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Jember dan Universitas Lambung Mangkurat ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang konstruktif dan dapat sebagai pembuka cakrawala dalam memahami keuangan sektor publik secara teoritis dan implementasinya

UPP STIM YKPN
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 7
Yogyakarta 55581
Telp.: (0274) 889317,
HP/WA: 08157988210
Email: uppstimykpn@gmail.com



Innovation and Technology for Reformation in Public Sector Finance

Bunga Rampai



PENYUNTING:
Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Ak., CA

Bunga Rampai : Innovation and Technology for Reformation in Public Sector Finance

Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Agustus 2023

PENYUNTING:

Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Ak., CA

ISBN 978-623-7845-57-7



Penerbit dan Pencetak:

UPP STIM YKPN

Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 7 Yogyakarta 55581

Telp./Faks. (0274) 889317, SMS Hotline 08157988210

Email: uppstimykp@gmail.com

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Ketua Tim Penulis dan Penyunting serta Ketua APSSAI

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga Buku Bunga Rampai ini “*Innovation and Technology for Reformation in Public Sector Finance*” terselesaikan. Buku Bunga Rampai ini tersusun secara sistematis untuk memudahkan pemahaman dan menambah referensi bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang keuangan sektor publik.

Rangkaian konsep dan isi yang disajikan dalam Buku Bunga Rampai ini bertujuan sebagai jendela pengetahuan bagi pembaca dalam memahami konsep-konsep secara sistematis tentang keuangan sektor publik. Isi dari Buku Bunga Rampai ini disusun berdasarkan kajian-kajian teoritis dan hasil penelitian yang menyangkut tentang keuangan sektor publik.

Buku Bunga Rampai ini adalah hasil karya bersama serta didukung banyak pihak dari berbagai pihak. Untuk itu atas nama semua Penulis dan Penyunting serta sekaligus Ketua Asosiasi Program Studi S2 Akuntansi Seluruh Indonesia (APSSAI) saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Jember
2. Rektor Universitas Gadjah Mada
3. Rektor Universitas Lambung Mangkurat
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
7. Semua pihak yang telah membantu dalam proses terselesaikannya Buku Bunga Rampai ini, baik dukungan dari keluarga, teman-teman Dosen sejawat dan mahasiswa yang ikut membantu pemikiran dalam penyempurnaan materi-materi buku serta berkenan memberikan gambaran pemikiran demi terselesaikannya Buku Bunga Rampai ini.

Diharapkan Buku Bunga Rampai ini yang merupakan kontribusi dari mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Jember dan Universitas Lambung Mangkurat dapat menjadi sumbangan pemikiran yang konstruktif dan dapat sebagai pembuka cakrawala dalam memahami keuangan sektor publik secara teoritis dan implementasinya. Saran dan kritik senantiasa diharapkan demi kesempurnaan isi dari Buku Bunga Rampai ini di kemudian hari. Semoga menjadi amal jariyah bagi kita semua. Aamiin.

Yogyakarta, Medio Agustus 2023

Prof. Dr. Abdul Halim, MBA, Akt. CA

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si, CRA.

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya, Bunga Rampai *Innovation and Technology for Reformation in Public Sector Finance* dapat terselesaikan. Sistematika pembahasan Bunga Rampai *Innovation and Technology for Reformation in Public Sector Finance* ini yaitu membahas beberapa studi kasus tentang keuangan sektor publik. Besar harapan penulis, kiranya bunga rampai ini yang merupakan salah satu output dari artikel mahasiswa magister akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dan Universitas Lambung Mangkurat yang nantinya dapat bermanfaat bagi semua kalangan.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya terhadap Rektor Universitas Jember, Rektor Universitas Gadjah Mada, Rektor Universitas Lambung Mangkurat serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNEJ/UGM/ULM dan Para Pimpinan serta civitas akademika. Penulis menyadari bunga rampai ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang konstruktif dari para pembaca.

Jember, Agustus 2023

Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si, CRA

KATA PENGANTAR

Dr. Atma Hayat, Drs, Ec, M.Si, Ak, CA.

Assalamualaikum wr wb, Shalom, Om Swasti Astu, Namu Budhaya, Salam Kebajikan.

Yang saya hormati,

1. Rektor Universitas Jember
2. Wakil Rektor Universitas Jember
3. Rektor Universitas Lambung Mangkurat
4. Wakil Rektor Universitas Lambung Mangkurat
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
6. Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
7. Narasumber-narasumber

Serta yang saya banggakan para mahasiswa kami, terutama yang telah menyelesaikan artikel / tesisnya sehingga dapat di-diseminasikan pada kesempatan ini. Selalu kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul di acara International Dissemination: Innovation and Technology for Reformation in Public Sector Finance. Acara ini menjadi keberlanjutan dari kerjasama antara FEB ULM dengan FEB UNEJ. Tentunya kegiatan ini menjadi motor penggerak pencapaian indikator kinerja untuk unit fakultas masing-masing. Dengan mengusung tema besar "Sektor Publik", kami berkolaborasi dengan FEB UNEJ mencoba memberikan ruang eksplorasi bagi audiens untuk memperdalam peran inovasi IT di reformasi keuangan sektor publik.

Dalam era yang terus berkembang ini, inovasi dan teknologi telah menjadi pendorong utama dalam mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor publik dan keuangan. Transformasi ini muncul sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat akan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan dana publik. Dalam acara ini, kita akan menjelajahi bagaimana inovasi dan teknologi dapat memainkan peran yang vital dalam reformasi keuangan sektor publik. Salah satu poin penting dalam reformasi keuangan sektor publik adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Teknologi hadir sebagai sarana untuk mencapai tujuan ini dengan cara yang lebih efektif. Solusi seperti sistem keuangan berbasis teknologi blockchain memungkinkan

catatan transaksi yang tak terubah dan dapat diakses oleh berbagai pihak secara real-time. Ini tidak hanya mengurangi risiko kecurangan, tetapi juga memberikan keyakinan kepada warga negara bahwa dana publik digunakan dengan benar.

Inovasi dan teknologi juga menghadirkan potensi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Automasi proses rutin seperti pembayaran, pengelolaan anggaran, dan pelaporan dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan. Selain itu, analitik lanjutan yang ditenagai oleh kecerdasan buatan dapat membantu para pengambil keputusan untuk merumuskan strategi yang lebih baik berdasarkan pola data yang teridentifikasi, menghasilkan alokasi anggaran yang lebih cerdas dan efektif.

Namun, pengimplementasian inovasi dan teknologi dalam sektor publik memerlukan pemberdayaan dan pendidikan yang baik. Sumber daya manusia perlu diberikan pelatihan dan pemahaman tentang teknologi yang akan diterapkan. Reformasi keuangan ini harus disertai dengan program-program pengembangan keterampilan agar para pegawai publik dapat menghadapi tantangan teknologi dengan percaya diri. Dengan pemberdayaan ini, sektor publik akan mampu mengambil manfaat maksimal dari potensi teknologi.

Sebagai penutup, kita melihat bahwa inovasi dan teknologi adalah pilar penting dalam reformasi keuangan sektor publik. Dengan transparansi yang ditingkatkan, efisiensi yang ditingkatkan, dan pemberdayaan yang kuat, kita dapat membayangkan masa depan yang lebih cemerlang untuk keuangan publik. Namun, kita harus mengingat bahwa teknologi hanyalah alat; semangat reformasi yang kuat dan komitmen untuk pelayanan publik yang lebih baik tetap menjadi fondasi utama dalam mencapai tujuan ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr wb, Salam Sejahtera, Om Shanti Shanti Om.

Banjarmasin, Agustus 2023

Dr. Atma Hayat, Drs, Ec, M.Si, Ak, CA.

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM PENYUSUN	iii
Ucapan Terima Kasih	iv
Kata Pengantar	v
Bio Data Penulis	xi

ARTIKEL 1 PENDIDIKAN DAN FORMASI AUDITOR DALAM PELAKSANAAN REVIEW ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Oleh : Mikaila

Khalisha Dadiarto, Ririn Irmadariyani	1
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
2. PEMBAHASAN	6
2.1 Pengaruh Pendidikan terhadap Pelaksanaan review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	7
2.2 Pengaruh Formasi Auditor terhadap Pelaksanaan review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	8
3. KESIMPULAN.....	9
1.1 Kesimpulan.....	9
4. DAFTAR PUSTAKA.....	10

ARTIKEL 2 AKUNTANSI MASJID: IDEOLOGI PANCASILA (STUDI MASJID DARUL FALAH JOMBANG JEMBER) Oleh : Femba Akris

Diantoro, Agung Budi Sulistiyo, Mohammad Fiqkri	11
1. PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang Masalah.....	11
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan.....	13
2. PEMBAHASAN	13

2.1 Profil Singkat Masjid Darul Falah	13
2.2 Struktur Organisasi Pengelolaan Masjid	14
2.3 Laporan Keuangan Masjid berdasarkan ISAK 35.....	14
2.4 Catatan atas Laporan Keuangan	16
2.5 Penerapan Ideologi Pancasila.....	16
3. KESIMPULAN.....	18
3.1 Kesimpulan.....	18
3.2 Saran.....	19
4. DAFTAR PUSTAKA.....	19

ARTIKEL 3 AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DI TEMPAT

IBADAH STUDI PADA AKUNTABILITAS PURA Oleh : Trisna Gayatri,

Yosefa Sayekti

Yosefa Sayekti	21
1. PENDAHULUAN	21
1.1 Latar Belakang Masalah.....	21
1.2 Rumusan Masalah	23
1.3 Tujuan.....	23
2. PEMBAHASAN	23
2.1 Karakteristik Organisasi Keagamaan	23
2.2 Tujuan, Fungsi, dan Peran Organisasi Keagamaan.....	24
2.3 Pura	25
2.4 Struktur Organisasi di Pura	28
2.5 Sumber Pendanaan Pura	29
2.6 Pengelolaan Keuangan di Pura.....	30
2.7 Praktik Akuntabilitas Publik Pada Organisasi Keagamaan....	32
2.8 Praktik Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan di Pura .	33
2.9 Pelaporan Keuangan Organisasi Keagamaan.....	36
2.10 Laporan Keuangan Organisasi Keagamaan Berdasarkan ISAK 35.....	38
2.11 Pelaporan Pengelolaan Keuangan di Pura.....	39
3. KESIMPULAN.....	42

3.1 Kesimpulan.....	42
3.2 Saran.....	44
4. DAFTAR PUSTAKA.....	45

ARTIKEL 4 PENERAPAN AKUNTANSI PSAK 109 PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) DI KABUPATEN LUMAJANG Oleh : Alifi Tria Susanti,

Ahmad Roziq	47
1. PENDAHULUAN	47
1.1 Latar Belakang Masalah.....	47
1.2 Rumusan Masalah	52
1.3 Tujuan.....	52
2. PEMBAHASAN	52
2.1 Deskripsi Subjek Penelitian pada LAZISMU Lumajang.....	52
2.2 Kesesuaian Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Di LAZISMU Kabupaten Lumajang Dengan PSAK 109	53
3. KESIMPULAN.....	56
3.1 Kesimpulan.....	56
3.2 Saran.....	57
4. DAFTAR PUSTAKA.....	58

ARTIKEL 5 AUDIT INTERNAL SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA, EFEKTIFKAH? Oleh : Cici Wijayanti, Taufik Kurrohman, Arif

Hidayatullah	59
1. PENDAHULUAN	59
1.1 Latar Belakang	59
1.2 Rumusan Masalah	63
2. PEMBAHASAN	63
2.1 Audit Internal Sektor Publik Indonesia	63
2.2 Efektivitas Auditor Internal	66
2.3 Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Auditor Internal	67

1.4 Independensi, Budaya Organisasi, Integritas, Kompetensi, dan Kerjasama Auditor Eksternal Meningkatkan Efektivitas Audit Internal Sektor Publik Indonesia	68
3. KESIMPULAN.....	70
3.1 Kesimpulan.....	70
4. DAFTAR PUSTAKA.....	71

ARTIKEL 6 AKUNTANSI AKRUAL UNIVERSITAS DI INDONESIA

Oleh : Ditio Adi Surya Wijaya Hadi, Siti Maria Wardayati, Isti Fadah,

Michael Chandra Gunawan	75
1. PENDAHULUAN	75
1.1 Latar Belakang.....	75
1.2 Rumusan Masalah.....	81
2. PEMBAHASAN	82
2.1 Biaya Siswa	83
2.2 Dana Penelitian	84
2.3 Hibah Modal	85
2.4 Warisan Perpustakaan	86
2.5 Warisan Koleksi Artistik	87
2.6 Hasil Analisis	87
3. KESIMPULAN.....	89
1.1 Kesimpulan.....	89
4. DAFTAR PUSTAKA	90

ARTIKEL 7 PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI FRAUD TENDENCY ALARM SEKTOR PEMERINTAHAN (STUDI KASUS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KAB.LUMAJANG) Oleh :

Imanita Septian Rusdianti, Nining Ika Wahyuni, Alfi Arif	93
1. PENDAHULUAN	93
1.1 Latar Belakang	93

2. PEMBAHASAN	95
2.1 Fraud Tendency	95
2.2 Pengendalian Internal	97
2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	97
2.4 Situs Penelitian: OPD Pemerintah Kabupaten Lumajang	98
2.5 Efektifitas Pengendalian internal dalam penerapan e finance sesuai komponen pengendalian internal COSO	98
2.6 Pengendalian Internal Sebagai Alarm Mencegah Fraud	101
3. KESIMPULAN.....	102
4. DAFTAR PUSTAKA.....	103

ARTIKEL 8 AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN

MASJID Oleh : Holilullah, Hendrawan Santosa Putra 105

1. PENDAHULUAN	105
1.1 Latar Belakang	105
1.2 Rumusan Masalah	108
2. PEMBAHASAN	108
2.1 Akuntansi	108
2.2 Akuntabilitas.....	108
2.3 Laporan Keuangan Non-Profit	109
2.4 Akuntabilitas Publik Pada Entitas Keagamaan	109
2.5 Praktik Akuntansi di Masjid Alamul Huda yang Masih Sederhana.....	110
1.6 Pengurus Sama-Sama Membantu terhadap Pengelolaan Keuangan Masjid Alamul Huda	111
1.7 Akuntabilitas Horizontal Para Pengelolaan Keuangan Masjid Alamul Huda Pada Seluruh Jamaah	113
1.8 Akuntabilitas Vertikal Sebagai Bentuk Tanggungjawab dalam Memakmurkan Masjid Alamul Huda	114
1.9 Profesi Pengurus Berbeda dengan Tanggungjawab	

Pekerjaannya.....	116
3. KESIMPULAN.....	117
4. DAFTAR PUSTAKA.....	118

ARTIKEL 9 DANA BOS: AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN TANTANGANNYA DI INDONESIA Oleh : Annisa Tri Hidayati, Atma

Hayat, Rahma Yuliani	121
1. PENDAHULUAN	121
1.1 Latar Belakang	121
2. PEMBAHASAN	123
2.1 Teori Keagenan.....	123
2.2 Good Governance	123
3. KESIMPULAN.....	130
3.1 Kesimpulan.....	130
4. DAFTAR PUSTAKA.....	131

ARTIKEL 10 PENTINGNYA MANAJEMEN KEUANGAN PADA PENGELOLAAN KEUANGAN YAYASAN PENDIDIKAN Oleh : Siti

Mutmainnah, Wahyudin Nor, Rahma Yuliani	133
1. PENDAHULUAN	133
1.1 Latar Belakang	133
1.2 Rumusan Masalah	135
2. PEMBAHASAN	136
2.1 Manajemen Keuangan Yayasan Pendidikan	136
2.2 Pentingnya Manajemen Keuangan Pada Yayasan Pendidikan	136
2.3 Siklus Manajemen Keuangan Yayasan Pendidikan	138
2.4 Sistem Keuangan pada Yayasan Pendidikan	139
2.5 Penyajian Laporan Keuangan Yayasan Pendidikan	140
2.6 Aspek perpajakan pada Yayasan Pendidikan	146
2.7 Tantangan Pengelolaan Keuangan Yayasan Pendidikan	147
3. KESIMPULAN.....	148

4. DAFTAR PUSTAKA.....	149
ARTIKEL 11 CONTINUOUS AUDITING DAN COUNTINUOUS MONITORING (CACM): TRANSFORMASI PENGAWASAN SEKTOR PUBLIK DI ERA DIGITAL Oleh : Dwi Puspita Sari,Wahyudin Nor.....	
1. PENDAHULUAN	151
1.1 Latar Belakang	151
2. PEMBAHASAN	152
2.1 Teori Keagenan	152
2.2 Transformasi Auditor Internal	153
2.3 Konsep <i>Continuous Auditing</i>	155
2.4 Konsep <i>Continuous Monitoring</i>	157
2.5 Penerapan <i>Continuous Auditing</i> dan <i>Continuous Monitoring</i> (CACM)	158
2.6 CACM dan <i>Three Lines Model</i>	160
2.7 CACM untuk Organisasi yang Efektif dan Efisien	162
3. KESIMPULAN.....	164
4. DAFTAR PUSTAKA.....	165

ARTIKEL 12 SIPD “MEREDUKSI” ATAU MEMPERKUAT Oleh :	
M. Khaidir Rahmatullah, Syaiful Hifni, Kadir	167
FUNGSI ANGGARAN DPRD?.....	167
1. PENDAHULUAN	167
1.1 Latar Belakang	167
2. PEMBAHASAN.....	170
2.1 Anggaran	170
2.2 Fungsi Anggaran DPRD.....	172
2.3 Peran DPRD Dalam Proses Penganggaran	173
2.4 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	174
2.5 SIPD Dalam Implementasi Fungsi Anggaran DPRD	176
3. KESIMPULAN.....	178

4. DAFTAR PUSTAKA.....	179
------------------------	-----

ARTIKEL 13 PENGELOLAAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN LAYANAN UMUM (PTN BLU) DAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN BH) Oleh : Syamsu Rizal Noor, Atma Hayat, Ade Andriani		181
1. PENDAHULUAN		181
1.1. Latar Belakang		181
1.2. Rumusan Masalah		183
2. PEMBAHASAN		183
2.1 PTN dengan BLU		183
2.2 PTN-BH		185
3. KESIMPULAN.....		191
4. DAFTAR PUSTAKA.....		192

ARTIKEL 14 PERAN PERENCANAAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA Oleh : Indriaty Ermayani, Syaiful Hifni, Sarwani		195
1. PENDAHULUAN		195
1.1. Latar Belakang		195
2. PEMBAHASAN.....		200
2.1. Perencanaan Pada Akuntabilitas Sistem Keuangan Desa ...		200
2.2. Penggunaan Aplikasi Siskeudes dan Implikasinya		201
2.3. Pengendalian Internal pada Pengawasan Keuangan Desa ..		202
2.4. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....		203
3 KESIMPULAN.....		204
4 DAFTAR PUSTAKA.....		205

ARTIKEL 15 INSPEKTORAT JENDERAL (AUDIT INTERN) DAN RISIKO AUDIT APAKAH PERAN INSPEKTORAT JENDERAL RENTAN TERHADAP RISIKO? Oleh : Yustisiana Sari, Kadir.....	209
1. PENDAHULUAN	209
1.1. Latar Belakang	209
2. PEMBAHASAN.....	212
2.1. Teori Kelembagaan.....	212
2.2. Teori Akuntabilitas	212
2.3. Audit dan Audit Internal.....	213
2.5. Regulasi terkait Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Inspektorat Jenderal	214
2.6. Risiko	214
2.7 Risiko Audit	215
2.8 Manajemen Risiko	215
2.9 Kematangan Risiko (<i>Risk Maturity</i>).....	216
2.10 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	216
2.11 Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.....	216
2.12 Pengawasan Intern Berbasis Risiko	217
2.13 Inspektorat Jenderal dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	217
2.14 Penelitian Terdahulu Terkait Audit Internal Berbasis Risiko ..	219
2.15 Audit Intern berbasis Risiko di Indonesia dan Permasalahannya	219
2.16 Faktor Penghambat Penugasan Audit Berbasis Risiko	220
2.17 Pembahasan faktor yang menghambat perencanaan Audit Intern Berbasis Risiko	220
2.18 Perubahan Paradigma dalam Pendekatan Risk Based Internal Auditing.....	221
3. KESIMPULAN.....	221
4. DAFTAR PUSTAKA.....	222

SUSUNAN TIM PENYUSUN	225
BIODATA SUSUNAN TIM PENYUSUN	227

ARTIKEL 10

PENTINGNYA MANAJEMEN KEUANGAN PADA PENGELOLAAN KEUANGAN YAYASAN PENDIDIKAN

Oleh :

Siti Mutmainnah

Wahyudin Nor

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu lembaga publik yang banyak didirikan oleh masyarakat baik individual maupun berkelompok adalah yayasan. Tujuan pendirian yayasan ini sangat berbeda dari tujuan pendirian badan usaha pada sektor privat yakni tidak bertujuan untuk mencari laba ataupun tidak bersifat komersial (*nonprofit*), sehingga yayasan banyak digunakan untuk sarana kegiatan pendidikan, sosial, keagamaan, kemanusiaan dan lainnya.

Di Indonesia, yayasan telah diatur oleh pemerintah berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 28 tahun 2004 yang menjelaskan bahwa *Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota* (Republik Indonesia, 2004). Yayasan sebagai entitas nonlaba, dalam menjaga kelangsungan kegiatan operasionalnya dapat menghimpun dana berupa sumbangan dari masyarakat, pemerintah maupun para donatur. Meskipun para donatur tidak mengharapkan keuntungan dari dana yang telah diberikannya, maka yayasan harus mampu menunjukkan akuntabilitasnya dengan menerbitkan laporan keuangan.

Namun, realitas saat ini yayasan justru tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuannya yaitu tidak berorientasi komersial. Terutama yayasan yang bergerak pada bidang pendidikan tidak sedikit mendapatkan kritik bahwa pengelolaannya menjurus pada pencarian keuntungan (komersial). Hal inilah banyak kita temui pada institusi pendidikan swasta besar yang bernaung dibawah yayasan, bahkan tidak sedikit lembaga pendidikan yang dikelola merupakan sekolah maupun perguruan tinggi swasta yang terkenal dengan kaum elit. Lembaga menerima sejumlah uang masuk yang sangat besar dan tentu saja diimbangi dengan fasilitas mewah yang diharapkan oleh para orangtua bisa menunjang pendidikan anak-anak mereka. Sehingga disatu sisi ada tuntutan dari orangtua ataupun donator untuk transparan dalam pengelolaan keuangan yayasan.

Berdasarkan dari realitas itulah saatnya yayasan pendidikan harus membuktikan bahwa mampu berperan secara profesional, akuntabel, dan transparan. Selain itu yayasan pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan melalui lembaga yang dikelolanya. Dalam rangka mencapai tujuan itulah perlu adanya manajemen pengelolaan lembaga secara komprehensif terhadap berbagai sumberdaya yang ada didalamnya dan salah satunya adalah pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dalam konteks ini adalah keuangan yang menjadi sumber dana operasional yayasan pendidikan.

Yayasan yang bergerak dibidang pendidikan saat ini berjumlah sangat besar, hal ini dapat kita lihat dari data statistik jumlah lembaga pendidikan di Indonesia yang lebih dari seperempatnya dikelola oleh pihak swasta dimana yayasan sebagai penyelenggara.

Tabel 1.1 Jumlah Lembaga Pendidikan Tahun 2021

Jenjang	Negeri	%	Swasta	%
SD	131058	88%	17685	12%
SMP	23670	58%	16927	42%
SMA	6899	50%	6966	50%
SMK	3629	26%	10449	74%
Pesantren			26975	100%
PT	125	4%	2990	96%
Jumlah	165.381	67%	81.992	33%

Sumber: Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, (2021); Katadata.id, (2022)

Pada tabel 1.1 dapat kita lihat jumlah lembaga pendidikan dari sekolah dasar samapai perguruan tinggi swasta se Indonesia pada tahun 2021 sebesar 81.992 dengan jumlah masing-masing jenjang SD 17.685, jenjang SMP 16.927, jenjang SMA 6.966, jenjang SMK 10.449, pesantren 26.975, perguruan tinggi 2.990 dan prosentase keseluruhan 33%. Data ini dapat dijadikan acuan bahwa jumlah lembaga pendidikan swasta yang dikelola oleh yayasan juga sangat banyak. Sehingga, tidak heran begitu banyak permasalahan ataupun penyimpangan yang dilakukan oleh yayasan karena lemahnya pengelolaan keuangan pada yayasan.

Adapun permasalahan seputar keuangan yayasan pendidikan yang sering dihadapi diantaranya pengelolaan keuangan yang kurang baik dalam hal ini pelaporan yang belum sesuai standar, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memahami seluk beluk keuangan yayasan dan aspek perpajakannya, adanya perilaku kecurangan oleh pihak tertentu dari organ yayasan, sumber pemasukan yang berkurang karena kondisi luar biasa seperti adanya pandemi yang menghambat kegiatan belajar mengajar, sumber pemasukan yang hanya mengandalkan dari SPP maupun uang pendidikan sedangkan keperluan dana belanja yang semakin besar, adanya tuntutan fasilitas dan pengembangan sarana dan prasarana yang lebih baik dan berbagai permasalahan lainnya yang akan terus dihadapi oleh yayasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin memaparkan berbagai hal yang menurut hemat penulis bisa menjadi sebuah referensi dalam pengelolaan keuangan yayasan yang profesional.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun hal- hal yang menjadi rumusan masalah dalam artikel ini adalah:

- a) Bagaimana manajemen keuangan yayasan pendidikan?
- b) Bagaimana pelaporan keuangan yayasan pendidikan?
- c) Apa saja aspek perpajakan yayasan pendidikan?
- d) Apa saja tantangan yang sering dihadapi yayasan yang mengelola bidang pendidikan?

2. PEMBAHASAN

2.1 Manajemen Keuangan Yayasan Pendidikan

Istilah manajemen secara bahasa berarti mengatur, mengelola atau mengurus. Manajemen didefinisikan sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami bagaimana dan mengapa sebuah organisasi bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama yang lebih bermanfaat bagi kemanusiaan (Masruri et al., 2021).

Fedena, (2019) *“Financial management is one of the most fundamental practices in any enterprise or business including schools and other educational institutes. Financial management essentially means planning, organizing, directing and controlling the financial activities in schools so that the financial resources are used in an efficient and effective manner. Financial management ensures that the administration and management team are able to manage the budget in a better manner and make informed decisions related to the school budget”*

Manajemen keuangan merupakan salah satu praktik yang paling mendasar di setiap perusahaan atau bisnis termasuk sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Pada hakikatnya pengelolaan keuangan berarti merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol kegiatan keuangan di sekolah agar sumber daya keuangan digunakan secara efisien dan efektif. Manajemen keuangan memastikan bahwa tim administrasi dan manajemen mampu mengelola anggaran dengan lebih baik dan membuat keputusan yang tepat terkait dengan anggaran sekolah (Fedena, 2019).

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen keuangan yayasan pendidikan adalah kegiatan pengelolaan keuangan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan keuangan di sebuah institusi pendidikan agar sumber daya keuangan digunakan secara efektif dan efisien.

2.2 Pentingnya Manajemen Keuangan Pada Yayasan Pendidikan

Manajemen keuangan pada yayasan pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kesuksesan penyelenggaraan

pendidikan yang berkualitas, karena manajemen keuangan berperan dalam mempengaruhi semua aspek. Hal tersebut akan mengarah pada efektivitas pengelolaan pendidikan agar terlaksana sesuai dengan visi dan misi yang diharapkan (Andiawati, 2017). Manajemen keuangan yang maksimal akan tercapai ketika dilakukan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaannya.

Melalui pengelolaan keuangan yang baik yayasan bisa merencanakan programnya secara optimal, selain itu untuk mengukur dan menjaga kesehatan kondisi keuangan lembaga. Beberapa hal berikut, alasan pentingnya manajemen keuangan pada yayasan pendidikan diantaranya:

1. Pemanfaatan dan pengelolaan dana yayasan lebih efisien dan efektif.
Semakin tinggi efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan yayasan pendidikan maka akan semakin mudah dalam mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Adanya jaminan penggunaan keuangan yayasan lebih akuntabel dan transparan.
Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada yayasan, akan membangun kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap lembaga.
3. Meminimalisir penyalahgunaan anggaran yang digunakan pada pos yang tidak sesuai.
Manajemen keuangan yang baik akan mendorong kinerja yang lebih baik sehingga adanya kecurangan maupun pelanggaran akan mudah ditelusuri.
4. Memberikan kemudahan bagi para pihak yang akan mengambil keputusan kebijakan dalam pengembangan yayasan. Pada siklus manajemen keuangan yayasan akan ada proses evaluasi dan monitoring serta pelaporan yang akan menjadi acuan pengelola yayasan untuk membuat perencanaan kedepannya.

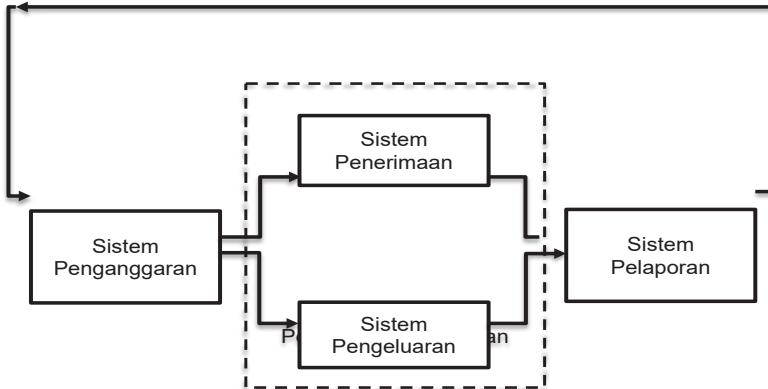
2.3 Siklus Manajemen Keuangan Yayasan Pendidikan



Gambar 1. Siklus Manajemen Keuangan Yayasan Pendidikan

Gambar 1 menjelaskan tentang gambaran siklus keuangan pada yayasan pendidikan yang diawali dari proses perencanaan kegiatan oleh manajemen baik itu pengurus yayasan maupun manajemen pengelola lembaga. Kemudian dilanjutkan dengan proses penyusunan anggaran berdasarkan perencanaan kegiatan yang sudah disusun. Dalam penyusunan anggaran tentunya tidak mengabaikan prinsip 3E (efektif, efisien dan ekonomis). Setelah proses penyusunan anggaran berikutnya pelaksanaan hal ini berkaitan dengan penatausahaan, proses pengadaan, perpajakan, dan proses pencatatan akuntansi. Siklus berikutnya adalah monitoring dan evaluasi dimana dilakukan oleh pengawas internal ataupun pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran. Kemudian dilanjutkan dengan pelaporan, dalam hal ini adanya laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pengurus yayasan yaitu berupa laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi.

2.4 Sistem Keuangan pada Yayasan Pendidikan



Gambar 2. Sistem keuangan pada Yayasan

Berdasarkan Gambar 2 menjelaskan tentang sistem pengelolaan keuangan yayasan ada 2 sistem besar yaitu sistem penerimaan dan sistem pengeluaran. Disinilah peran akuntansi dalam pengelolaan dana masuk maupun dana keluar. Kemudian dalam sistem tersebut disusun prosedur-prosedur yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran dana.

Adapun sumber pendanaan yang bisa didapat oleh yayasan pendidikan diantaranya:

1. Pemerintah

Dana yang bersumber dari APBN ataupun APBD yang biasanya disalurkan melalui program BOS/ BOSDA untuk sekolah, dan hibah bagi perguruan tinggi.

2. Orang Tua/Wali

Lembaga pendidikan swasta dapat menghimpun dana melalui biaya pendidikan (SPP) maupun dana pembangunan atau sejenisnya dari orang tua atau wali untuk pengembangan fasilitas sarana prasana. Semakin baik fasilitas yang diinginkan orangtua maka biayanyapun akan lebih mahal.

3. Masyarakat

Lembaga Pendidikan dapat menghimpun pendanaan dari masyarakat umum selain orangtua atau wali seperti bantuan dari donasi dari lembaga sosial, donasi dari alumni, donasi dari lembaga keuangan, sponsorship dari perusahaan dan lainnya.

4. Dana Swadaya

Lembaga pendidikan bisa mendapatkan sumber dana dari usaha yang bersifat mandiri seperti kantin, minimarket, koperasi, catering dan even lainnya.

2.5 Penyajian Laporan Keuangan Yayasan Pendidikan

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber daya yang dimiliki organisasi, sekaligus semua kegiatan yang dilakukan atas sumber daya tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Secara umum semua badan hukum wajib membuat laporan keuangan yang ditujukan kepada *stakeholder* termasuk yayasan tentunya harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk transparansi atau keterbukaan informasi keuangan yayasan.

Adapun laporan keuangan yayasan mengacu pada PSAK 45 yang sejak 1 Januari 2020 diganti dengan ISAK 35. Penyusunan laporan keuangan untuk entitas nonlaba tidak lagi berdasarkan pada PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba* tetapi dialihkan pada ISAK 35: *Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*. Secara umum penyajian laporan keuangan versi ISAK 35 dan PSAK 45 tidak terdapat perbedaan yang signifikan, namun sedikitnya ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan oleh yayasan dalam menyajikan laporan keuangan sebagai berikut:

Tabel 2. Perbedaan Pelaporan berdasarkan ISAK 35 dan PSAK 45

PSAK 45	ISAK 35
<p>Laporan terdiri dari (1) Neraca (2) Laporan Aktivitas (3) Laporan Arus Kas (4) Catatan Atas Laporan Keuangan</p> <p>Klasifikasi asset netto Terdiri dari asset netto tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen</p> <p>Laporan Aktivitas Memberikan informasi mengenai pendapatan (-) beban (=) surplus atau defisit tahun berjalan lalu (+) saldo awal (=) saldo akhir</p> <p>Laporan Perubahan Asset Neto hanya sebagai alternatif</p> <p>Penghasilan Komprehensif Lain Tidak ada</p>	<p>Laporan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Posisi Keuangan 2. Laporan Penghasilan Komprehensif 3. Laporan Perubahan Aset Neto 4. Laporan Arus Kas 5. Catatan Atas Laporan Keuangan <p>Klasifikasi asset netto pembatasan dan tanpa pembatasan</p> <p>Laporan Penghasilan Komprehensif Memuat informasi sampai surplus atau defisit tahun berjalan.</p> <p>Laporan Perubahan Asset Neto Merupakan salah satu jenis laporan keuangan pada entitas nonlaba. Penghasilan Komprehensif Lain Penghasilan Komprehensif lain diakomodir dalam Laporan keuangan entitas non laba.. (Gustani, 2021)</p>

Format Penyajian Laporan keuangan berdasarkan ISAK 35

Contoh Laporan Posisi Keuangan (Format A)

ENTITAS XYZ		
Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20X2		
(dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
ASET		
<i>Aset Lancar</i>		
Kas dan setara kas	xxxx	xxxx
Piutang bunga	xxxx	xxxx
Investasi jangka pendek	xxxx	xxxx
Aset lancar lain	xxxx	xxxx
Total Aset Lancar	xxxx	xxxx
<i>Aset Tidak Lancar</i>		
Properti investasi	xxxx	xxxx
Investasi jangka panjang	xxxx	xxxx
Aset tetap	xxxx	xxxx
Total Aset Tidak Lancar	xxxx	xxxx
TOTAL ASET	xxxx	xxxx
LIABILITAS		
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>		
Pendapatan diterima di muka	xxxx	xxxx
Utang jangka pendek	xxxx	xxxx
Total Liabilitas Jangka Pendek	xxxx	xxxx
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>		
Utang jangka panjang	xxxx	xxxx
Liabilitas imbalan kerja	xxxx	xxxx
Total Liabilitas Jangka Panjang	xxxx	xxxx
Total Liabilitas	xxxx	xxxx
ASET NETO		
<i>Tanpa pembatasan (without restrictions) dari pemberi sumber daya</i>		
Surplus akumulasian	xxxx	xxxx
Penghasilan komprehensif lain*)	xxxx	xxxx
<i>Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya (catatan B)</i>		
	xxxx	xxxx
Total Aset Neto	xxxx	xxxx
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	xxxx	xxxx

Contoh Laporan Posisi Keuangan (Format A)

(A)

*) entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya (misalnya, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

(A) Lihat Laporan Perubahan Aset Neto.

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia (2019)

Contoh Laporan Penghasilan Komprehensif (Format A)

ENTITAS XYZ		
Laporan Penghasilan Komprehensif		
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2		
(dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
<i>Pendapatan</i>		
Sumbangan	xxxx	xxxx
Jasa layanan	xxxx	xxxx
Penghasilan investasi jangka pendek (catatan D)	xxxx	xxxx
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	xxxx	xxxx
Lain-lain	xxxx	xxxx
Total Pendapatan	xxxx	xxxx
<i>Beban</i>		
Gaji dan upah	(xxxx)	(xxxx)
Jasa dan profesional	(xxxx)	(xxxx)
Administratif	(xxxx)	(xxxx)
Depresiasi	(xxxx)	(xxxx)
Bunga	(xxxx)	(xxxx)
Lain-lain	(xxxx)	(xxxx)
Total Beban (catatan E)	(xxxx)	(xxxx)
Surplus (Defisit)	xxxx	xxxx
DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
<i>Pendapatan</i>		
Sumbangan	xxxx	xxxx
Penghasilan investasi jangka panjang (catatan D)	xxxx	xxxx
Total Pendapatan	xxxx	xxxx
Surplus (Defisit)	xxxx	xxxx
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	xxxx	xxxx
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	xxxx	xxxx

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia, (2019)

Contoh Laporan Perubahan Aset Neto

ENTITAS XYZ		
Laporan Perubahan Aset Neto		
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2		
(dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	XXXX	XXXX
<i>Surplus tahun berjalan</i>	XXXX	XXXX
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	XXXX	XXXX
Saldo akhir	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
 <i>Penghasilan Komprehensif Lain</i>		
Saldo awal	XXXX	XXXX
Penghasilan komprehensif tahun berjalan***)	XXXX	XXXX
Saldo akhir	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Total	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
 ASET NETO DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	XXXX	XXXX
Surplus tahun berjalan	XXXX	XXXX
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan C)	(XXXX)	(XXXX)
Saldo akhir	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
 TOTAL ASET NETO	 <u>XXXX</u>	 <u>XXXX</u>



(B)



(A)

***) entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya (misalnya jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).

(A) Lihat Laporan Posisi Keuangan (Format A).

(B) Lihat Laporan Posisi Keuangan (Format B).

Contoh Laporan Arus Kas (*Metode Langsung*)

ENTITAS XYZ		
Laporan Arus Kas		
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2		
(dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
AKTIVITAS OPERASI		
Kas dari sumbangan	xxxx	xxxx
Kas dari pendapatan jasa	xxxx	xxxx
Penerimaan lain-lain	xxxx	xxxx
Bunga yang dibayarkan	(xxxx)	(xxxx)
Kas yang dibayarkan kepada karyawan	(xxxx)	(xxxx)
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap	(xxxx)	(xxxx)
Penerimaan dari penjualan investasi	xxxx	xxxx
Penerimaan hasil investasi	xxxx	xxxx
Pembelian investasi	(xxxx)	(xxxx)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi</i>	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
AKTIVITAS PENDANAAN		
<i>Penerimaan dari sumbangan yang dibatasi untuk:</i>		
Investasi dalam dana abadi (<i>endowment</i>)	xxxx	xxxx
Investasi bangunan	xxxx	xxxx
	xxxx	xxxx
<i>Aktivitas pendanaan lain:</i>		
Pembayaran utang jangka panjang	(xxxx)	(xxxx)
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</i>	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	xxxx	xxxx
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia, (2019)

2.6 Aspek perpajakan pada Yayasan Pendidikan

Yayasan pendidikan dalam operasionalnya tidak akan lepas dari aspek perpajakan. Setiap transaksi dana yang masuk seperti dana pendidikan, dana dari pemerintah maupun dana yang keluar seperti belanja jasa, belanja barang, belanja pegawai, belanja modal masing-masing mempunyai kewajiban atas pajak. Adapun aspek pajak yang harus diperhatikan oleh yayasan diantaranya (Maulida, 2019):

1. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak penghasilan atas gaji guru serta karyawan, dan jasa lainnya seperti arsitek pembangunan gedung pendidikan. Dalam hal ini yayasan wajib memotong, menyetor dan melaporkan PPh 21 yang telah dipotong oleh bendaharawan Yayasan.
2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak penghasilan dari kegiatan pembangunan gedung yang dilakukan kontraktor maupun pihak lain dari semua kegiatan jasa konstruksi.
3. PPh Pasal 29 SPT Tahunan PPh Badan merupakan PPh dari sisa lebih Yayasan yang mana Jika sisa lebih tersebut tidak dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan pembangunan gedung dan sarana-prasarana yayasan pendidikan setelah dalam jangka waktu 4 tahun maka akan diperhitungkan Pphnya, sebaliknya jika sisa lebih tersebut digunakan untuk melakukan pembangunan gedung dan sarana-prasarana yayasan wajib melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Nihil.
4. PPh Pasal 23 merupakan PPh atas kegiatan yang menjadi objek PPh, diantaranya ada jasa catering, sewa kendaraan, jasa antar jemput dan jasa lainnya yang menjadi objek pajak PPh pasal 23.
5. PPh pasal 25 bulanan ini merupakan PPh yang terutang yang harus disetorkan secara rutin maksimal tanggal 15 setiap bulannya dan wajib melaporkan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Jika tidak ada maka wajib melaporkan saja meskipun nihil.
6. PPh Pasal 26 jika ada mempekerjakan WNA maka wajib memotong, menyetor dan melaporkan atas penghasilan WNA orang pribadi.

Perpajakan ini sangat penting bagi yayasan pendidikan, sehingga sangat diperlukan bagi pengelola Yayasan pendidikan untuk memahami objek pajak, akuntansi perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan Yayasan.

2.7 Tantangan Pengelolaan Keuangan Yayasan Pendidikan

Setiap organisasi maupun entitas pasti tidak lepas dari berbagai permasalahan khususnya dalam pengelolaan yayasan pendidikan. Yayasan akan menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang datang silih berganti terutama permasalahan dalam pengelolaan keuangan. Permasalahan pengelolaan keuangan ini akan berpengaruh besar terhadap eksistensi, mutu dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Oleh karena itu pengelola yayasan sudah seharusnya mempersiapkan, mendeteksi berbagai resiko yang akan dihadapi.

Hal-hal yang menjadi tanda-tanda kondisi keuangan sebuah yayasan pendidikan yang sedang tidak baik diantaranya

- a. Adanya tunggakan hak /gaji guru/ dosen dan karyawan.
- b. Peniadaan beberapa kegiatan sekolah /pesantren/ PT seperti kegiatan ekstrakurikuler, unit kegiatan mahasiswa maupun program yang biasanya selalu ada jadi tidak dilaksanakan.
- c. Kegiatan pembangunan yang tertunda/ tidak selesai.
- d. Laporan Keuangan yang tidak transparan.
- e. Cashflow yang selalu minus.
- f. Fasilitas maupun peralatan yang tidak bertambah seiring bertambahnya tarif atau biaya masuk yang sudah dinaikkan yang diperkirakan penambahan pemasukan yang cukup besar.
- g. Resiko tagihan hutang/ pembiayaan yang besar pada pihak ketiga yang tidak diprediksi berdasarkan analisa laporan keuangan.

Pengurus maupun pemegang kebijakan harus mampu mengatasi semua hal yang menjadi tantangan yayasan kedepannya karena akan berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh yayasan untuk mengatasi permasalahan keuangan diatas diantaranya :

1. Perbaikan Manajemen Keuangan Yayasan

Para pemegang kebijakan harus melakukan perbaikan dimulai dari sumber daya manusia (SDM) yang baru yang mempunyai skill dan pemahaman yang baik tentang keuangan, penganggaran, dan lainnya.

2. Inovasi baru mencari pemasukan

Yayasan pendidikan tidak harus mengandalkan pemasukan dari sumber dana pendidikan saja. Yayasan bisa bekerjasama dengan

pemerintah, pihak ketiga, individu maupun perusahaan untuk membangun atau memenuhi sarana prasarana sekolah.

3. Peningkatan budaya kerja

Yayasan harus senantiasa meningkatkan motivasi pegawainya untuk selalu bersikap professional, jujur, amanah dalam setiap kerjanya. Yayasan memiliki standar integritas dan kejujuran yang tinggi dalam semua aktivitas keuangan. Sementara kebijakan, deskripsi pekerjaan, dan kontrol internal membantu menjaga integritas ini, mereka dibangun di atas dasar misi, nilai, dan kepemimpinan.

4. Sumber pemasukan internal

Yayasan bisa mendapatkan sumber pemasukan dari usaha internal seperti koperasi guru/karyawan, jasa catering, jasa antar jemput, minimarket dan lainnya.

5. Kerjasama investasi pendidikan

Keputusan sebuah yayasan untuk melakukan investasi harus berdasarkan analisa yang baik. Kerjasama untuk pembiayaan bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan keuangan. Namun hal ini harus dianalisa terlebih dahulu secara akurat oleh pengurus yayasan sebelum mengambil keputusan.

3. KESIMPULAN

Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan sangat penting untuk menerapkan manajemen keuangannya secara professional karena akan berpengaruh terhadap kualitas dan mutu layanan pendidikan yang diberikannya. Permasalahan dalam manajemen keuangan akan selalu ada dalam setiap perjalannya sehingga yayasan harus benar dalam menerapkan praktik manajemen keuangan yang membangun stabilitas dan fleksibilitas baik saat ini maupun di masa depan. Hal hal yang harus diperhatikan diantaranya dari aspek:

- a. Perencanaan: Perencanaan anggaran penting karena menyediakan informasi keuangan untuk mendukung semua perencanaan. Anggaran yang efektif bersifat realistis, menggunakan asumsi yang masuk akal dan akuntabilitas yang jelas untuk mencapai asumsi tersebut.
- b. Informasi Keuangan: Setiap organ yayasan diharapkan mampu mempelajari terminologi, memahami dan menggunakan laporan

- keuangan, dan mengajukan banyak pertanyaan. Informasi yang baik disediakan oleh staf dan profesional yang terlatih dan dihormati.
- c. Perpajakan: Setiap organ yayasan harus memahami bahwa akan ada kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh yayasan. Sehingga, perlu adanya pemahaman yang komprehensif terkait aspek perpajakan ini.
 - d. Tanggung Jawab Keuangan: Tanggung jawab untuk membuat keputusan keuangan dan melaksanakan kegiatan keuangan dibagi di seluruh organisasi. Tanggung jawab perlu didukung dengan informasi yang baik, komunikasi yang sering, dan kewenangan yang sesuai.
 - e. Akuntabilitas dan Transparansi: Pengurus Yayasan, pemerintah, masyarakat, semua orang menuntut informasi dan jawaban tentang bagaimana sebuah entitas menerima dan menggunakan sumber daya keuangan. Tren ini semakin cepat dan banyak organisasi nonlaba memilih untuk menjadikan akuntabilitas sebagai nilai organisasi yang penting. (Jackson, 2019)

4. DAFTAR PUSTAKA

- Andiawati, E. (2017). Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan / Sekolah. *Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 1–6. <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/snpe/article/view/10646>
- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Pendidikan 2021. In *Badan Pusat Statistik*.
- Fedena. (2019). *School Finance Management: How to Manage it Effectively?* <https://fedena.com/blog/2019/07/school-finance-management.html>. <https://fedena.com/blog/2019/07/school-finance-management.html>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). DE ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. *Ikatan Akuntan Indonesia*. www.iaiglobal.or.id
- Jackson, S. (2019). Twelve Golden Rules of Nonprofit Finance. *Nonprofit Essentials Conference*, 55414.

- Katadata.id. (2022). *Ada 26.975 Pesantren di Indonesia, di Provinsi Mana yang Terbanyak?* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/31/ada-26975-pesantren-di-indonesia-di-provinsi-mana-yang-terbanyak>
- Masruri, M., Ali, H., & Imron Rosadi, K. (2021). Pengelolaan Keuangan Dalam Mempertahankan Kualitas Pondok Pesantren Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 644–657. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.573>
- Maulida, R. (2019). *Mengenal Aspek Pajak Yayasan Pendidikan di Indonesia*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/pajak-yayasan-pendidikan>
- Republik Indonesia. (2004). Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. In *Undang-Undang Republik Indonesia*.